

JURNAL P3M

KURIOSITAS

Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan

GENDER DALAM PERSPEKTIF KELUARGA BUGIS

- Dr. Uswatun Hasanah, M.Pd

PENTINGNYA MANAJEMEN DAKWAH PADA LEMBAGA DAKWAH AL-ISLAH
DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA DAKWAH DI MAKASSAR

- Nurhikmah, M.Sos.I

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP REAKSI PASAR PADA PERUSAHAAN
TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

- Damirah, SE, MM

AKAR KERAGUAN DAN PENOLAKAN TERHADAP AGAMA

- St. Jamilah Amin, M.Ag

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 82 UU.No.7/1989 DAN PERMA No.1/2008
TENTANG UPAYA DAMAI DALAM PERKARA PERCERAIAN

- Drs. Sudirman L, MH



Diterbitkan Oleh :
Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
STAIN PAREPARE

Kuriositas	Edisi IV	Hal. 01-160	NO.01	Parepare Juni 2011	ISSN 1979-5572
-------------------	-----------------	------------------------	--------------	-----------------------------------	---------------------------

DINAMIKA SOSIAL POLITIK ISLAM MELALUI KEPEMIMPINAN KERAJAAN MANDAR

A. Nurkidam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan permasalahan yang sangat urgen dikaji dan ditelaah, baik bersifat normatif maupun historis. Kepemimpinan menjadi kodrat manusia dalam melakoni kehidupan, karena menjadi *mainstream* dalam eksistensi order sosial. Manusia secara kodrati memiliki naluri untuk mengatur dan berkuasa, di sisi lain sebagai makhluk sosial berkeinginan untuk hidup dalam kedamaian dan keteraturan. Pemenuhan tuntutan tersebut, manusia senantiasa berada dalam ranah kepemimpinan.

Dalam konteks yang lebih luas, kepemimpinan senantiasa dikaji dalam kaitannya dengan organisasi, baik yang berskala kecil maupun berskala besar. Kepemimpinan selalu terkait dengan ranah politik,¹ sehingga teori-teori kepemimpinan banyak dibahas di dalam disiplin ilmu politik.² Kepemimpinan biasanya diidentikkan dengan manajemen dan administrasi³ karena dalam disiplin ilmu manajemen dan administrasi selalu terkait dengan ilmu manajemen.

Kepemimpinan yang terkait pada sistem kerajaan tampak dua kutub, yakni kepemimpinan yang diktator-otoriter dan kepemimpinan yang arif dan demokratis. Kepemimpinan raja Mandar perlu dikaji lebih mendasar dalam kaitannya dengan dinamika sosial politik Islam yang berkembang Mandar. Diskursus tersebut sangat urgen diteliti untuk mengkaji kepemimpinan kerajaan Mandar dan kaitannya dengan dinamika sosial politik Islam di masyarakat Mandar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan diskursus tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika sosial politik Mandar setelah datang Islam?
2. Bagaimana peran kepemimpinan kerajaan Mandar dalam mendorong dinamika sosial politik Islam?

¹Dalam kepemimpinan membangun relasi antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin), dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut/bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Kepemimpinan berfungsi untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang lain melakukan sesuatu demi pencapaian tujuan. Lihat Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Edisi Baru, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 4-5.

²Politik merupakan proses penentuan tujuan dan usaha mencapai tujuan yang ditetapkan. Pencapaian tujuan berbagai kegiatan yang dilaksanakan yakni kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (*public policies*), pembagian (*distribution*), dan kewenangan (*authority*). Lebih lanjut lihat Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Cet. X, Jakarta: Gramedia, 1986), h. 8

³Manajemen atau administrasi peran utamanya adalah gaya atau pola mengikat orang dalam suatu institusi atau lembaga, dan biasanya prosedur kerjanya mengatur pola pengambilan keputusan, koordinasi, pendelegasian wewenang, jalur dan saluran tanggung jawab, hubungan kerja (*vertical* dan *horizontal*), mekanisme pemecahan masalah, interaksi eksternal, dan sebagainya. Lebih jelasnya lihat Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 11.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah dan Demografi Mandar

Dalam sejarahnya, penggunaan istilah Mandar tidak diketahui secara pasti kapan dimulainya. Istilah Mandar sulit ditelusuri waktu berdirinya sebagai sebuah wilayah sosial politik (kerajaan) karena merupakan suatu kesatuan budaya dan nama dari salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia yang berada di Wilayah Indonesia Timur dan tepatnya di Propinsi Sulawesi Barat. Setelah Mukhtar Luyo yang bertempat di Luyo, yang bertujuan memperkokoh dua persekutuan antara *Pitu Ulunna Salu* (Tujuh Hulu Sungai) dan *Pitu Ba'bana Binanga* (Tujuh Muara Sungai), maka kedua persekutuan tersebut sepakat membentuk kekuatan besar yang disebut "Sipamandar" yang bermakna "Saling Menguatkan". Dari istilah inilah muncul term Mandar yang berarti "Kuat".⁴

Dengan demikian, istilah kerajaan Mandar tidak pernah ada, yang ada hanyalah kerajaan-kerajaan kecil yang berjumlah empat belas yang berserikat. Kedua persekutuan itu menamakan diri *Pitu Ulunna Salu* (Tujuh Hulu Sungai) dan *Pitu Ba'bana Binanga* (Tujuh Muara Sungai). Dalam wilayah *Pitu Ulunna Salu*, terdiri atas kerajaan-kerajaan yaitu Tabulahan, Aralle, Rante Bulahan, Mambi, Bambang, Ta'bang, Matangnga; sedangkan dalam wilayah *Pitu Ba'bana Binanga*, terdiri atas Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Benuang.

Wilayah suku Mandar berada dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat, yang berada antara 10-30 Lintang Selatan, antara 118^o-119^o Bujur Timur. Memanjang dari Selatan ke Utara dengan batas; wilayah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang (Propinsi Sulawesi Selatan), dan wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala (Propinsi Sulawesi Tengah); wilayah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Tana Toraja (Propinsi Sulawesi Selatan).

B. Konsep Kepemimpinan di Mandar sebelum Islam

Konsep dan model kepemimpinan di Mandar sebelum Islam belum sepenuhnya diketahui, namun tidaklah berarti informasi-informasi tidak ada sama sekali. Tampaknya melalui ungkapan-ungkapan berupa *pappasang* (petuah, pesan leluhur) maupun *rapang* (perumpamaan) atau petuah-petuah lainnya banyak memberi petunjuk tentang kekuasaan dan wibawa di tanah Mandar.

Sebelum dilaksanakan Konferensi Tammajarra II antara kerajaan-kerajaan yang ada di daerah pinggiran, yang dianggap besar adalah Passokkorang, yang daerahnya di sekitar wilayah Mapilli Polewali Mandar. Selain dari itu, ada persekutuan kerajaan sebelumnya terbentuk *Pitu Ulunna Salu* (Tujuh Hulu Sungai) dan *Pitu Ba'bana Binanga* (Tujuh Muara Sungai), yang dikenal istilah *Bo co Tallu* (Persekutuan Tiga Kerajaan), yaitu Alu', Taramanu, dan Sendana. Raja-raja di Mandar yang diberikan amanah untuk mengatur pemerintahan berdasarkan dengan hukum-hukum yang ada, bersama-sama dengan pemangku adat. Pengangkatan raja di Mandar, tidak selamanya keturunan raja, namun demikian, tetap keturunan bangsawan.

Menurut Aco Arif, bahwa: "Bisa saja raja disebabkan karena keberanian, kepintaran, kekayaan, dan kepribadian (akhlak). Akan tetapi yang paling dominan adalah keberanian, kepintaran, dan akhlak."⁵ Pernyataan ini mendeskripsikan bahwa kriteria pemimpin di Mandar masih mengedepankan faktor profesionalisme untuk masanya,

⁴Baharuddin Lopa, *Hukum Laut, Pelayaran, dan Perniagaan*, (Bandung: Pen. Alumni, 1982), h. 20-21.

⁵Aco Arif, Tokoh Adat Mandar, *wawancara*, pada tanggal 27 Desember 2009.

walaupun masih tetap menjadikan status kebangsawanan. Sebagai contoh, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Ballada. Bahwa: "Dulu seorang yang digelar *Pue Tonileo* (dikepung) melarikan diri ke Kally Sulawesi Tengah karena masyarakatnya tidak setuju disebabkan perbuatannya yang tercela."⁶ Hal tersebut menegaskan bahwa model kekuasaan dalam kepemimpinan di Mandar telah mengenal sistem demokratis yang bertanggungjawab.

Di dalam Lontara Mandar, *O diadaq O dibiassa*, sebagai referensi hukum di Balanipa, ditegaskan bahwa:

Apabila seorang laki-laki berselisih dengan sesama laki-laki, *To makaka* di Napo duduk menyaksikan kedua laki-laki yang berselisih itu disuruh dimasukkan ke dalam *Bala Batu* keduanya bersetumpu di dalam lalu bertikam ... siapa yang luka atau tewas itulah yang bersalah.⁷

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Burhanuddin bin Muh. Jafar (*Puanna Yuga*), menyatakan bahwa "Jauh sebelum adanya adat (hukum) kehidupan seperti kehidupan di zaman jahiliah di Makkah, dimana sistem yang dipakai dalam menguasai adalah keberanian dan kekuatan, dan siapa yang berani dan kuat itulah yang berkuasa."⁸ Setelah *Todilaling (Imanyambungi)* kembali ke Mandar, ia dilantik menjadi raja dan ia merupakan raja pertama di Balanipa. Setelah melihat kebiasaan (*To Makaka*) di Napo dalam menjalankan hukuman, maka terpikirlah olehnya untuk mengirim utusan ke Gowa (Sulawesi Selatan) guna meminta petunjuk tentang hukum yang berlaku di sana. Setelah adat (hukum) berlaku, maka berlakulah suatu pemerintahan yang berdiri di atas hukum. Adapun hukum yang berlaku di daerah Mandar setelah *Imanyambungi* berkuasa, terlihat dalam ungkapan *Mua Sambalanu Talloqi Lita Rupu'i*⁹ (apabila kekuatan dalam satu negara terhimpun dalam satu tangan ibarat telur tertimbun dalam satu keranjang tanpa batas, maka negara itu akan hancur).

Kerajaan dalam konsep budaya, juga diibaratkan sebuah perahu yang dikemudikan oleh seorang nahkoda. Ini tergambar dalam ungkapan, "*anak koda mara'dia, banua kaiyyang toi lopi*"¹⁰ (ibarat perahu dalam satu kerajaan, raja hanya sebagai nahkoda, pemilik perahu adalah rakyat melalui wakil-wakilnya). Bila seorang raja melanggar aturan-aturan, maka sendirinya rakyat akan menurunkan raja tersebut dari tahtanya. "...seorang anggota masyarakat yang menyimpang dari norma adat yang telah merupakan kesepakatan antara manusia itu, akan terkena secara langsung sanksi sosial atau sanksi adat".¹¹

Sebelum terbentuknya *Pitu Ulunna Salu* (Tujuh Hulu Sungai) dan *Pitu Ba'bana Binanga* (Tujuh Muara Sungai), dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan di wilayah kerajaan Mandar terbagi atas dua, yaitu sistem pemerintahan diktator dengan kesewenang-wenangan dan sistem pemerintahan demokrasi dengan mufakat. Salah satu kerajaan Mandar diktator adalah Pasokkorang, memiliki pengaruh yang besar

⁶Yusuf Ballada., Tokoh Adat Mandar, *Wawancara*, pada tanggal 26 Desember 2009.

⁷Abd. Muttalib, dkk., *O diadaq O dibiassa*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Dirjen Kebudayaan, Depdikbud., 1988), h. 52.

⁸Burhanuddin bin Muh. Jafar, Tokoh Adat Mandar Sendana, *Wawancara*, pada tanggal 4 Januari 2010.

⁹Darwis Hamzah, *Hakekat Kebudayaan Mandar*, makalah, pada Seminar Kebudayaan Mandar 26-27 Nopember 1987, di Polewali Mamasa, h. 7.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), h. 6.

terhadap kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitarnya. Kerajaan Passokkorang pada awalnya diketahui sebagai kerajaan yang baik, arif, dan bijaksana, namun pada saat-saat berakhir (diambang kehancurannya) menjadi kerajaan yang dzalim. Kedzaliman kerajaan Passokkorang, dideskripsikan oleh M. Madjid Tanawall Azis Syah, sebagai berikut:

1. Orang Napo dilarang mendirikan rumah di Tamajarra, bila ia mendirikan di pagi hari maka ia diruntuhkan di sore hari.
2. Kalau ada orang Napo, Mosso, Todang-todang, dan Samasundu lewat agak miring songkoknya, ia langsung ditempeleng (tampar)
3. Kalau ada orang Passokkorang ke Napo, melihat orang pakai sarung Sutra, maka sarung sutranya dikeluarkan dan dijadikan lap kaki.
4. Kalau melihat gadis cantik lewat dari sungai membawa air, langsung ditangkap dan diperkosa.
5. Orang-orang Passokkorang suka mengambil istri orang lain.¹²

Deskripsi di atas menunjukkan kebengisan dan sikap *taghut* kerajaan Passokkorang, sehingga pada akhirnya menjadi runtuh dan hancur. Kehancuran kerajaan Passokkorang menjadi segera terwujud setelah merampas istri bangsawan dari *Ulu Salu* (hulu sungai), yaitu Pongkatau. "Karena istrinya cantik, maka Pongkatau dibunuh dan istrinya dirampas oleh Raja Passokkorang".¹³ Kasus ini menjadi pemicu sikap antipati dari rakyat dan kerajaan di sekitarnya, sehingga dihancurkan di bawah komando Raja Balanipa. Setelah kerajaan Passokkorang hancur, maka kerajaan *Pitu Ulunna Salu* (Tujuh Hulu Sungai) dan *Pitu Ba'bana Binanga* (Tujuh Muara Sungai) terbentuk, maka sistem pemerintahan semakin mengarah kepada sistem demokrasi, misalnya penyelesaian setiap masalah melalui musyawarah pemangku adat sebagai lembaga legislatif.

Bila seorang raja tidak berhasil dalam menjalankan tidak berhasil, maka lembaga adat segera mengambil tindakan untuk mengganti raja atau pemerintah tersebut dengan jalan musyawarah. Menurut A.M. Mandra, bahwa "dalam pemerintahan tradisional Mandar, lingkungan hidup turut serta berperan untuk memutih-hitamkan kedudukan raja/pemimpin dan segenap perangkat hadatnya".¹⁴ Hal ini menegaskan orang Mandar memperhatikan bagaimana sikap dan tingkah laku seorang pemimpin, apakah sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku untuk mengoreksi dirinya.

Hal yang sama, juga disampaikan oleh Pua' Tanniaga, sebagai berikut:

*Moa' tattisamba'i lembong, tammappa'dendangmi palungan, tammettittiruku'mi manu', tammembura'mi mera' tammendaummi ayu pangale, malanemi buttu, la'ammi lita', ammalassuammi dui'-dui', bulemi bandangan, pajiri pasa'tippo, patiti salu-salu ana'mu ambelmi awiasang dlasimemangan odiada' odibiasa.*¹⁵ (manakala ombak sudah tidak memecah lagi ke pantai, lesung sudah tak berdendang lagi, ayam sudah tak berkokok, pinang sudah tak berbunga, pepohonan hutan belantara sudah tidak berdaun, gunung-gunung sudah pada gundul, tanah sudah leang, rerumputan sudah pada layu, pikullah tombak pusaka, selipkan keris pusaka di

¹²M. Madjid Tanawall Aziz Syah, *Akulturasi Kultur Antar Kelompok Masyarakat Mandar Tempo Doeloe*, Makalah, Panitia Seminar Kebudayaan Mandar 26-27 Nopember 1987, di Polewall Mandar.

¹³*Ibid.*

¹⁴A.M.Mandra, *Lingkungan Hidup dalam Pandangan Tradisional Mandar*, Seminar Kebudayaan Mandar tanggal 26-27 Nopember 1987 di Polewall Mamasa, h. 2.

¹⁵*Ibid.*

pinggang, miringkan ke kiri destar di kepala, kemudian lakukanlah kebiasaan leluhur, sesuai hukum dan kebiasaan serta tradisi).

Seseorang yang bersedia jadi raja, harus siap dikritik, karena kritik sebagai masukan demi kelancaran roda pemerintahan raja. Seorang raja selalu menerima saran-saran yang dapat memperbaiki citra kepemimpinannya. Itulah sebabnya raja tidak selalu berprinsip tidak berani dan tidak pula penakut. Pada hakekatnya, gabungan negeri-negeri di *Ulunna Salu* belum dapat dikatakan sebagai sebuah kerajaan karena *Pitu Ulunna Salu* merupakan suatu susunan masyarakat yang sangat kuat dalam mempertahankan sifat-sifat tradisional, yang terdiri dari persekutuan dari tiap-tiap kelompok yang ada di hulu sungai.

Dengan adanya orang *Tinanta* (salah satu kelompok masyarakat di hulu sungai) yang dipimpin oleh Londo Dehata. Ketika orang *Tinanta* menyerang *Tabulahang*, sampai orang *Tinanta* digusur ke *Tana Mea* (Mandar). Hal ini mengakibatkan munculnya gagasan untuk membentuk persekutuan di *Ulunna Salu*. Dalam menjalankan roda pemerintahan di *Pitu Ulunna Salu*, penguasa dibantu oleh beberapa anggota pejabat yang tergabung dalam lembaga adat, yaitu:

1. *To Makada*, juru penerangan, yang bertugas mendampingi *To Maindo* (yang dituakan) untuk membicarakan masalah-masalah kenegaraan.
2. *Sando*, secara harfiah berarti dukun, tetapi jabatan inilah yang menangani masalah-masalah kesejahteraan negeri (keagamaan, kesehatan, dan pendidikan).
3. *Pangulu Tau*, artinya panglima perang, dialah yang menangani masalah keamanan negara, dan mengangkat perang.
4. *So'be*, artinya pertanian, tetapi pada dasarnya jabatan inilah yang menangani masalah perekonomian negeri dalam bidang pertanian...¹⁶

Setiap wilayah pemerintahan di *Ulunna Salu*, terbagi dalam beberapa daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Negeri disebut *Lembang* yang dipimpin oleh *Indo*.
2. *Lembang* terbagi ke dalam beberapa *Botto* atau *Tondok*, yang dikepalai *Indona*.
3. *Tondok* terbagi lagi ke dalam beberapa *kampung* (kampung), yang juga dikepalai oleh *Indona*.¹⁷

Kemudian kerajaan yang ada dalam wilayah *Pitu Babana Binanga* terdapat dalam Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Utara. Dalam persekutuan *Pitu Babana Binanga*, sesuai dengan fungsi masing-masing, susunannya adalah: (1) Kerajaan *Balanipa* sebagai Bapak; (2) Kerajaan *Sendana* sebagai Ibu; (3) Kerajaan *Banggae* sebagai anak laki-laki; (4) Kerajaan *Pamboang* sebagai anak perempuan; (5) Kerajaan *Tappalang* sebagai anak; (6) Kerajaan *Mamuju* sebagai anak; dan (7) Kerajaan *Binuang* sebagai anak.

Dengan demikian, kedudukan kerajaan-kerajaan yang ada di *Babana Binanga*, kerajaan *Balanipa* yang terbesar. Kerajaan ini berkedudukan sebagai kepala di antara kerajaan-kerajaan *Babana Binanga* disusul kerajaan *Sendana*. Setiap kerajaan tidak boleh mengintervensi wilayah kerajaan lainnya. Dapat disimak apa yang dikatakan Raja *Balanipa* dan Raja *Sendana*, pertama terbentuknya *Pitu Babana Binanga*, sebagai berikut:

Pada mappabicara tau bicaratta, pada mapporapangi tau rapatta, pada mappabiassa tau biasatta, tassipeisanni tau ada' di lalang banua, tassiatanang

¹⁶ *Ibid*, h. 15-16.

¹⁷ *Ibid*., h. 16.

*tanang, tassira'du' tana'-tana', tassipebuttu-buttuang, tassipele-pelepeang, tassipolotanjang, tassipotande barang-barang, tassitula' toi.*¹⁸ (kita selesaikan permasalahan kita masing-masing, menjalankan hukum kita masing-masing, melakukan kebiasaan kita masing-masing, dan tiada campur tangan dalam urusan adat di dalam negeri masing-masing, kita saling tanam-menanamkan tetapi tidak saling mencabuti tanam-tanaman, tidak ke gunung masing-masing, tidak ke lereng, tidak menghalangi maksud, tidak bersaing harta, dan tidak saling meruntuhkan harta).

Adat luhur sebagai pegangan pada kerajaan yang ada di *Pitu Babana Binanga* harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan agar dapat hidup berdampingan yang harmoni dan saling menghormati.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat kualitatif dengan mengkaji budaya Mandar sebagai objek. Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh melalui lapangan.¹⁹ Penelitian kualitatif mencakup subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris – studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan visual – yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang.²⁰

B. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial, politik, budaya, historis, dan religius.

C. Sumber Data

Sumber data ada yang bersifat primer dan sekunder. Data primer yaitu dari hasil wawancara langsung dari informan, sedang data sekunder berasal dari studi dokumen, dan *focus group discussion* (FGD).

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen, wawancara, dan *focus group discussion* (FGD).

E. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai proses merinci usaha formal yang dapat disintesis dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja-seperti yang disarankan oleh data.²¹ Data deskriptif sering hanya dianalisa menurut isinya, dan karena itu, analisis

¹⁸ Abd. Muthalib, dkk., *op.cit.*, h. 24.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Cet. VI, Bandung: Alfabeta, 2009), h. 25.

²⁰ Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research, terjemahan Dariyatno, Badrus Samsul Fata, dan Jhon Rinaldi*, "Handbook of Qualitative research" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 2.

²¹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 103.

semacam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*).²² Burhan Bungin menyatakan bahwa analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keragaman isi pesan atau komunikasi secara kualitatif, bagaimana peneliti memaknai isi komunikasi atau pesan ... kemudian satuan makna dan kategori dianalisis dan dicari hubungan satu dengan lainnya untuk menemukan makna, arti dan tujuan dari isi pesan atau komunikasi itu.²³ Analisis isi dilakukan dengan kajian teks, konteks, motivasi historis, dan sasaran yang diharapkan dari isi tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan yang dibawa oleh ajaran Islam terhadap Mandar

1. Islam Datang ke Mandar

Kapan Islam masuk dan berpengaruh di tanah Mandar samapi sekarang belum jelas, begitu juga siapa pembawanya. Sebagian sejarawan Mandar berpendapat bahwa Islam masuk di daerah Mandar sekitar atau sebelum 1603 M., yang di bawah oleh pelaut-pelaut Mandar itu sendiri.

Pendapat yang menyimpulkan bahwa orang Mandar telah memeluk Agama Islam jauh sebelum tahun 1603, diperkuat oleh keterangan Pinto, orang portugis yang mengunjungi Sulawesi Selatan pada tahun 1544 dan menemukan pedagang-pedagang yang beragama Islam dari Malaka dan Patani (Thailand).²⁴

Adapun jalur-jalur yang dilalui masuknya Islam di Indonesia adalah perdagangan, mengingat situasi dan kondisi Indonesia yang strategis letaknya sebagai tempat perdagangan maritim.

Menurut pendapat umum yang dianut oleh orang, Agama Islam datang di Indonesia melalui jalur perdagangan. Pendapat ini tentunya juga didasarkan situasi perdagangan internasional pada waktu itu, berikut keterlibatan orang-orang muslim dalam dunia perdagangan. Hal lain didasarkan pula pada posisi strategis Indonesia yang terletak di sepanjang jalur perdagangan maritim, samudra Hindia dan Selat Malaka.²⁵

Dari kedua pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan yang membawa Islam ke daerah Mandar adalah para pelaut. Mengingat pada waktu itu orang-orang mandar adalah para pelaut, kemungkinan besar dalam pelayarannya mereka bertemu dengan orang-orang yang beragama Islam.

Penyiaran Islam menempuh dengan cara damai, juga berlangsung di Mandar para muballigh Islam tidak menemukan kesulitan apa-apa bahkan penerimaan agama Islam sebagai agama resmi dan tidak dianggap membahayakan dalam kehidupan sosial dan menerima Islam mulai dari rajanya sampai pada rakyat biasa. Namun penerimaan Islam hanya dalam pengakuan tetapi pelaksanaannya belum. Sebagaimana yang dikatakan Muh. Jafar, menyatakan bahwa "pada mulanya pemeluk agama Islam di

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Cet. IV, Jakarta: Rajawali Press, 1988), h. 94.

²³ Burhan Bungin (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h. 134.

²⁴ Baharuddin Lopa, *Pengaruh Hukum Islam kebudayaan Mandar*, makalah pada seminar kebudayaan Mandar di Polewali Mamasa 25-26 september 1987, h. 4

²⁵ Team penyusun Tex Box IAIN Alauddin, *Sejarah dan kebudayaan Islam*, Jilid III, (Ujung Pandang: Pembinaan perguruan tinggi Agama Islam kerjasama IAIN Alauddin Ujung Pandang 1983), h.71.

Mandar hanya mengaku saja, namun dalam prakteknya belum begitu dilaksanakan.²⁶ Kemudahan penerimaan Islam disebabkan hukum dan sistem kepercayaannya dalam konsep budaya menghampiri dengan ajaran Islam. Baharuddin Lopa, menyatakan bahwa "Salah satu penyebabnya ialah hukum adat (adat istiadat) yang berlaku di daerah mandar sebelum masuknya Islam di daerah ini, umumnya sesuai pula asas-asas hukum Islam".²⁷

Hukum yang berlaku dan diterapkan di Mandar khususnya hukum adat, baik urusan pemerintahan, ekonomi, maupun kehidupan sosial lainnya menyebabkan Islam mudah diterima di Mandar. Seperti yang dikemukakan *Mara'dia Balanipa, Tomatindo Dilagana*, sebagai berikut:

*lamo die rapanna mara'dia anna tokayyang, mua sisalai rapanna ditokayyang diule, apa nauwwa todio'lo'ta idai maulle, diullei dai, duellei naung mua sisalai tokayyang anna tokayyang tau tappa diule.*²⁸ (Inilah misalnya raja dengan para anggota adat, kalau berselisih anggota adatlah yang diikuti sebab pesan orang tua kita dulu sesuatu yang tidak disanggupi para anggota adat baik tindakan ke atas maupun anggota ke bawah kalau para anggota adat berselisih maka rakyat yang diikuti).

Kemudian diikuti kata-kata petua "*mua landuri tosituru matindoi adat*" (kalau lewat atau muncul orang-orang yang bersepakat maka tidurlah hukum) ini memberikan pengertian telah selesai.²⁹

2. Islam dan Perubahan di Mandar

Perubahan-perubahan yang dibawa Islam juga terjadi di masyarakat Mandar. Pada mulanya, perubahan yang dibawa oleh Islam begitu terasa khususnya dalam bidang sosial kemasyarakatan. Tetapi dalam bidang pemerintahan memang terjadi suatu perubahan dengan adanya lembaga syara' dalam suatu pemerintahan atau kerajaan dan rajanya haruslah beragama Islam.

Sebelum Islam berpengaruh di Mandar, sudah ada semacam hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Lembaga ini merupakan kunci utama dalam suatu kerajaan pada waktu itu, dan lembaga ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Mattulada:

Empat macam saja yang memperbaiki negara barulah dicukupkan lima macamnya ketika sampai kepada keislaman dan dimasukkan dalam syara' (syariat) Islam itu, pertama *ade'*, kedua *rapang*, ketiga *wari'*, keempat *bicara*. Adapun *ade'* itu ialah memperbaiki rakyat, dan adapun *rapang* itu ialah mengokohkan kerajaan, dan adapun *wari'* memperkuat kekeluargaan negara (yang sekeluarga), dan adapun *bicara* ialah yang memagari perbuatan sewenang-wenang adanya, dan adapun *syara'* adalah sandarannya orang yang lemah dan jujur.³⁰

Dengan penyebaran agama Islam secara damai ini mempermudah penerimaan agama Islam di mandar, karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta adat istiadatnya. Menurut Muhammad Ja'far Puanna Yuga "Bukanlah adat yang meresap ke

²⁶ Burhanuddin bin Muh. Jafar, , *op.cit.*

²⁷ Baharuddin Lopa, *op.cit.*, h. 8.

²⁸ *Ibid*, h. 9

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Mattulada' *Islam di Sulawesi Selatan*, dalam Taufik Abdullah (Ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*. (Jakarta: CV Raja Wall, 1983), h. 233.

dalam agama akan tetapi agamalah yang meresap ke dalam adat”³¹ perubahan dalam hidup keagamaan seperti dengan adanya saran ibadah, dan dalam peribadatan yang dulunya menyembah dewata, tapi setelah Islam menyembah Allah.

B. Pengaruh Ajaran Islam dalam Kepemimpinan di Mandar

Islam datang dengan membawa pengaruh besar dalam perkembangan kehidupan masyarakat dari semua aspek kehidupan manusia. Pengaruh ini bersumber dari ajaran Islam itu sendiri yang ajarannya universal dan sistematis. Ajaran Islam selalu menyuruh pemeluk-pemeluknya untuk berkembang agar mengalami kemajuan yang pada akhirnya dapat mengembangkan amanah yang diberikan Allah kepadanya sebagai khalifah di atas bumi ini. Pengaruh ini disebabkan karena ajaran Islam yang sangat aktual dan membawa pengaruh dalam kehidupan manusia, bukan saja di dunia Arab dimana Islam itu berasal akan tetapi ia juga membawa pengaruh besar dimana Islam diterima sebagai agama suatu bangsa atau daerah termasuk di Mandar.

Pengaruh ajaran Islam ini amat kuat dalam kehidupan atau pertumbuhan kebudayaan mandar utamanya dalam soal akidah. Seorang yang akan dijadikan pemimpin atau raja maka harus pula dilihat dari segi akidahnya atau agamanya. Apabila bukan beragama Islam dengan sendirinya ia tidak dapat diangkat jadi pemimpin atau raja, pedoman hidup yang diperpegangi orang Mandar dahulu dapat disimak ungkapan berikut ini.

*Madhondong duangbongi ana mammulami siipuang sangga mappikkirri alawena ana andiang tomi mappikkirri tau mai'di, tattangai napolena lembong tallu, raqbana buttu lambi lao accurna banua.*³² (Besok lusa apabila para penguasa hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa memikirkan orang lain kepentingan orang banyak, tunggulah datangnya ombak besar runtuhnya gunung akan hancurnya negeri).

Ungkapan ini syarat dengan penuh hikmah dan nasehat dimana seorang pemimpin tidak boleh bersifat mementingkan diri sendiri akan tetapi harus lebih utama memperhatikan kepentingan umum demi kemaslahatan ummat. Begitu pula dalam hukum adat istiadat pada umumnya sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dalam ajaran Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Baharuddin Lopa sebagai berikut:

Karena asas-asas muamalah yang di bawa oleh Islam sebagian besar telah ada dalam masyarakat Mandar, Sulawesi Selatan (Barat) pada umumnya salah satu penyebabnya bahwa hukum adat istiadat yang berlaku di daerah mandar sebelum masuknya Islam kedaerah ini umumnya sesuai pula dengan asas-asas hukum Islam.³³

Petunjuk dan petuah orang tua serta pengaruh langsung dari syariat Islam itu membuat para pemimpin di daerah Mandar tidak jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat lainnya. Dengan sendirinya perintah yang dikeluarkan oleh para penguasa atau pemimpin, berwibawa sehingga mendapat kepercayaan dan dukungan dari rakyatnya.

Agama Islam termasuk tentunya hukum Islam telah mempengaruhi kebudayaan masyarakat mandar. Perubahan yang mendasar yang telah terjadi adalah di bidang akidah dimana dengan masuknya Islam tersebut maka dasar-dasar kepercayaannya

³¹ Burhanuddin bin Muh. Jafar, *Wawancara, op.cit.*

³² Baharuddin Lopa, *op. cit.*, h. 426.

³³ *Ibid.*, h. 8

masyarakat mandar yang umumnya menyembah benda-benda alam dan roh nenek moyangnya, telah ditinggalkan samasekali dan diganti dengan akidah Islam.³⁴

Akan tetapi dari segi-segi muamalah dapat dikatakan tidak begitu banyak perubahan karena ajaran Islam dari segi ini di Mandar hanya bersifat memperkaya, menyempurnakan dan memperhalus unsur-unsur budaya yang telah ada.

C. Struktur Pemerintahan di Mandar Setelah Islam

Sebelum kedatangan agama Islam di daerah Mandar, struktur pemerintahan sudah ada. Dasar-dasar administrasi negara atau kerajaan dalam menata pemerintahan telah diletakkan oleh *Imanyambungi* menurut versi sebagian orang dan ia juga raja pertama di kerajaan Balanipa. Tapi setelah kedatanga agama Islam, dan Islam diterima sebagai agama kerajaan, maka struktur pemerintahan mengalami sedikit perubahan walaupun perubahan itu tidak banyak.

Dengan diterimanya Islam sebagai agama Kerajaan maka dibentuklah suatu lembaga syara' (syariat Islam) merupakan bagian integral dari pada hukum adat. Maka peran ulama dalam suatu kerajaan sangat besar. Adapun perubahan dalam struktur pemerintahan adanya pengangkatan Kali (qadhi) dengan istilah lainnya *mara'dianya syara'* (rajanya syariat) peranan qadhi amat besar terlihat dari ungkapan ini:

Apa bila terjadi perkelahian di dalam negeri dimana saja dihadapkan tidak akan bertambah para asal ditangan oleh syara' (pengadilan agama). Adat harus dipedomani karena sebab adat adalah peraturan yang harus ditaati dalam negeri tiga hal yang saling melengkapi kebesaran agama dengan dilandasi oleh adat: *Pertama*, berlindung di bawah naungan dakwah agama (khotbah); *Kedua*, bersandar pada peraturan (keputusan) qadhi (hakim); dan *Ketiga*, mendekati diri kepada Allah dengan jalan bertasbih.³⁵

Dalam pengangkatan seorang Qadhi, harus diperhatikan apakah ia memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama dan adat itu sendiri. Di antara syarat-syarat Qadhi itu menurut syamsuddin, menyatakan bahwa "harus mempunyai ilmu pengetahuan agama yang luas dan mempunyai budi pekerti yang luhur (berkhlik mulia) serta keturunan bangsawan"³⁶ Dengan adanya unsur pengurus syara' (syariat Islam), struktur kerajaan dimulai dengan Raja (*Mara'dia/Arayang*), di bawahnya adalah Qadhi, *Mara'dia Malolo*, *Mara'dia Matoa*, *Annangguru*, *Imam*, *Pappuangang (pungaha)*, *Bete-bete*, *Pa'bicara*, dan kerajaan kecil. Sekalipun ada perubahan dalam struktur pemerintahan, namun dalam masalah kewenangan tidak ada perubahan sama sekali, baik di bidang pemerintahan maupun bidang lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

- A. Dinamika sosial politik Mandar setelah Islam datang semakin baik. Kondisi sosial kemasyarakatan dapat terbangun tatanan yang baik, norma semakin humanis, politik semakin demokratis, persatuan semakin kokoh, perekonomian semakin meningkat, dan sistem pemerintahan tersusun secara tegas dengan kewenangan yang jelas.
- B. Peran kepemimpinan raja Mandar dalam mendorong dinamika sosial politik Islam sangat tinggi. Raja Mandar menjadikan syara' sebagai asas yang terintegrasi oleh adat. Raja mengangkat ulama menjadi qadhi' dan penyelesaian perkara harus sesuai

³⁴ *Ibid.*, h. 12.

³⁵ Abd Mutthalib, dkk., *op.cit.*, h. 81.

dengan syara'. Kemudian kepemimpinan kerajaan Mandar di dalamnya ada qadhi, imam, dan annangguru sebagai ahli agama dan menjadi penasehat raja. Raja sebagai *mainstream* kehidupan bagi rakyat, tentu dinamika terjadi bagian dari *support* dari raja. Apalagi raja dikelilingi oleh ahli agama Islam, maka setiap keputusan dan kebijakan tidak akan bertentangan dengan syara'.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hamid, *Manusia Bugis Makassar*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985)
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Cet. X, Jakarta: Gramedia, 1986)
- Bungin, Burhan, (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004)
- Denzin, Norman K., & Yvonna S.Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*, terj. Dariyatno, Badrus Samsul Fata, dan Jhon Rinaldi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Hamka, *Sejarah Umat Islam IV*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1981)
- Hamzah, Darwis, *Hakekat Kebudayaan Mandar*, makalah, pada Seminar Kebudayaan Mandar 26-27 Nopember 1987, di Polewali Mamasa
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Edisi Baru, (Jakarta: Rajawali Press, 1992)
- Lopa, Baharuddin, *Hukum Laut, Pelayaran, dan Perniagaan*, (Bandung: Pen. Alumni, 1982)
- Lopa, Baharuddin, *Pengaruh Hukum Islam kebudayaan Mandar*, makalah pada seminar kebudayaan Mandar di Polewali Mamasa 25-26 september 1987
- Mandra, A.M., *Lingkungan Hidup dalam Pandangan Tradisional Mandar*, Seminar Kebudayaan Mandar tanggal 26-27 Nopember 1987 di Polewali Mamas.
- Mattulada', *Islam di Sulawesi Selatan*, dalam Taufik Abdullah (Ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*. (Jakarta: CV Raja Wali, 1983)
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993)
- Muttalib, Abd., dkk., *O diadaq O dibiasa*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Dirjen Kebudayaan, Depdikbud., 1988)
- Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara, 1998)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Cet. VI, Bandung: Alfabeta, 2009)
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelltian*, (Cet. IV, Jakarta: Rajawali Press, 1988)
- Syah, M. Madjid Tanawali Aziz, *Akulturasi Kultur Antar Kelompok Masyarakat Mandar Tempo Doeloe*, Makalah, 1987.
- Team penyusun Tex Box IAIN Alauddin, *Sejarah dan kebudayaan Islam*, Jilid III, (Ujung Pandang: Pembinaan perguruan tinggi Agama Islam kerjasama IAIN Alauddin Ujung Pandang 1983)